

Kapasitas Tunda Jual Petani Padi

Studi Kasus di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah



Kapasitas Tunda Jual Petani Padi

Studi Kasus di Boyolali, Jawa Tengah

Oleh : Dede Mulyono

Rancangan sampul :
uahono

Layout : Ocep

Penerbit
Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan
Sindangbarang Grande No. 16
Sindangbarang, Bogor. 16617
URL : www.kedaulatanpangan.net
email : admin@krkp.org

Tahun : 2010

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
1. Pembuka	01
2. Produktivitas Agronomis dan Luasan Lahan Garapan	04
3. Ongkos Produksi dan Kebutuhan Sosial	13
4. Tebasan dan Soal Agraria	25
5. Lumbung Paceklik, <i>Sense of Crisis</i> , dan Peran Perempuan	28
6. Penutup	37
Daftar Bacaan	41

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
1. Pembuka	01
2. Produktivitas Agronomis dan Luasan Lahan Garapan	04
3. Ongkos Produksi dan Kebutuhan Sosial	13
4. Tebasan dan Soal Agraria	25
5. Lumbung Paceklik, <i>Sense of Crisis</i> , dan Peran Perempuan	28
6. Penutup	37
Daftar Bacaan	41

PENGANTAR

Keragaman kondisi sosial-budaya dan agroekosistem sangat berpengaruh pada kemampuan sebuah komunitas dalam memenuhi dan mengatur kebutuhan pangannya. Wujud nyatanya adalah seberapa banyak pangan, khususnya beras yang bisa dihasilkan oleh rumah tangga petani dan komunitas pada luasan lahan garapan dengan tingkat produktivitasnya. Kemampuan memenuhi pangan bagi komunitas masing-masing kemudian dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan selain pangan yang hanya bisa dipenuhi dengan cara menukarnya di pasar. Walaupun hasil panen yang mereka tukarkan bukanlah kelebihan dari kebutuhan pangan mereka sendiri.

Pada titik yang mengharuskan petani padi menjual hasil produksi berasnya, mereka menghadapi persoalan dinamika harga dan nilai tukar di pasar. Fakta yang sering dihadapi, pada saat panen raya produksi cukup melimpah, sedangkan permintaan relatif stabil sepanjang tahun, sehingga harga turun pada tingkat yang tidak memberikan keuntungan bagi petani. Sebaliknya pada musim paceklik, seringkali kebutuhan pangan umumnya melebihi produksi yang tersedia, sehingga harganya meningkat. Dampak ketajaman fluktuasi tersebut sangat berpengaruh terhadap pendapatan petani, yang pada gilirannya juga berdampak pada tingginya resiko ketahanan pangan di tingkat rumah tangga petani.

Petani padi skala kecil baik petani tanpa lahan maupun petani berlahan sempit merupakan kelompok yang paling rentan terhadap fluktuasi harga gabah dan beras. Meskipun mereka telah mengembangkan pola nafkah ganda, kondisi kehidupan buruh tani tidak mengalami perubahan dan identik dengan kemiskinan dan kelaparan di desa.

Persoalan tersebut mendorong lahirnya pemikiran untuk mengembangkan mekanisme bersama dalam komunitas untuk mengurangi atau menghindari fluktuasi harga pasar. Mekanisme tersebut dikenal dengan nama sistem "tunda jual". Pengembangan model sistem tunda jual pada umumnya bertujuan agar petani mampu menahan hasil panen untuk sementara waktu untuk mendapatkan harga jual yang lebih baik di pasar. Pada tingkatan tertentu upaya ini tidak hanya sekedar mendapat nilai lebih, tetapi juga sebagai upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan komunitas petani secara mandiri dan mengurangi ketergantungan atas pasar untuk memenuhi kebutuhan pangan. Upaya tersebut penting dilakukan, terutama ketika kebijakan pemerintah dalam perlindungan harga bagi petani padi tidak berjalan dengan baik dan kekuatan pasar yang tidak bisa dikendalikan pemerintah.

Upaya ini sudah banyak dilakukan oleh komunitas, baik yang dilakukan secara mandiri, dengan bantuan dana dari pemerintah maupun pendampingan oleh LSM. Pengembangan kemampuan tunda jual juga menjadi salah satu upaya pokok KRKP dalam meningkatkan derajat kedaulatan pangan di kalangan petani produsen padi. Praktek-praktek tersebut ada yang berhasil mencapai tujuan maupun tidak.

Terkait dengan kenyataan tersebut, KRKP dengan dukungan VECO Indonesia melakukan kajian mengenai kapasitas tunda jual petani padi ini. Studi tersebut dirancang untuk melihat seberapa besar kemampuan komunitas membentuk dan mengembangkan sistem tunda jual. Pengetahuan dan pemahaman ini akan menjadi bekal penting bagi KRKP untuk menyiapkan strategi dan pendekatan dalam mendampingi komunitas menuju kedaulatan pangan. Sejalan dengan itu, dapat juga menjadi bekal bagi KRKP dalam mempengaruhi pemerintah dalam kebijakan mengembangkan sistem tunda jual.

Studi dilakukan di dua desa di Boyolali, Jawa Tengah. Kedua desa tersebut bukanlah desa yang unik dari segi sosioekonomi dan sosiobudaya. Keduanya adalah desa pertanian padi yang secara ekonomi-politik terbuka dari tekanan pasar lewat sistem sewa dan tebasannya, tetapi secara geografis agak berbeda. Satu desa tergolong desa pertanian padi dengan irigasi yang memadai dan desa lainnya termasuk desa pertanian dengan sistem irigasi yang terbatas.

Kajian lapang mengenai kapasitas tunda jual yang dilakukan pada Maret 2010 menghasilkan buku yang sedang anda baca. Buku ini ditulis oleh seorang antropolog muda yang mempunyai perhatian besar terhadap kehidupan petani kecil pedesaan, yang juga menjadi peneliti kajian lapang.

Sebagaimana sebuah studi kasus, isi buku ini tidak bisa sepenuhnya pengetahuan umum untuk semua gejala di semua tempat. Meski demikian, dengan sudah cukup banyaknya penelitian tentang perekonomian pertanian padi di Indonesia, bisa diperlihatkan bahwa beberapa unsur dan aspek yang diteliti bisa ditemukan dengan mudah di penelitian-penelitian lain.

Seperti akan dapat dibaca, dari keseluruhan isi buku ini, substansi utamanya yang juga merupakan temuan utama kajian lapangan terdapat dalam dua bab 2 hingga bab 5. Bab 1, sebagai pembuka, menguraikan latar dan konteks persoalan, sedangkan Bab 6, merupakan semacam kesimpulan dan rekomendasi, sebagai penutup.

Akhirnya, Selamat membaca
Bogor, Oktober 2010

Yusup Napiri Maguantara

1. Pembuka

Pada tahun 1993 tercatat ada 11,5 juta orang yang tergolong petani padi. Meski jumlah itu menyusut menjadi 10,7 juta orang pada tahun 2003 tetapi tetap saja produksi beras menduduki peringkat teratas dalam jumlah petani yang menghidupi diri dan keluarganya dari produksi beras (Karsyno, 2006). Memang beras masih merupakan bahan pangan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Konsumsi beras masih menempati kedudukan teratas dibandingkan dengan bahan-bahan pangan lainnya; setidaknya di wilayah pedesaan Jawa. Di Jawa, beras bukan hanya sumber pokok asupan karbohidrat, tetapi juga identitas diri sebagai orang Jawa (Husken, 1998).

Terkait dengan kenyataan tersebut, salah satu indikator tingkat kedaulatan pangan di kalangan petani produsen padi ialah kapasitas menunda-jual panen. Kapasitas tunda-jual berarti kemampuan rumahtangga petani dan atau kelompok menahan sementara waktu penjualan hasil panennya. Kapasitas tunda jual terkait dengan watak gabah sebagai hasil panen sebagai bahan pangan pokok sekaligus sebagai salah satu sumber uang tunai rumahtangga.

Sulit diabaikan bahwa sekarang ini petani-petani padi sudah menjadi bagian dari jaringan perekonomian kapitalis global. Gabah dan beras menjadi komoditi pasar. Saluran dominan distribusi dan konsumsi gabah dan beras adalah pasar berbasiskan uang. Begitu pula dengan distribusi dan pemanfaatan lahan garapannya.

Penempatan gabah di kedudukan sebagai barang dagangan dan orientasi produksi yang dituntut pasar (dan pemerintah) yang cakupannya lebih luas dari lingkup desa menjadikan hubungan-hubungan kelembagaan yang berkembang di dalam produksi gabah cenderung mengutamakan tuntutan pasar ketimbang tuntutan pemenuhan kebutuhan rumahtangga petani sendiri (Breman dan Wiradi, 2004). Itulah sebab yang mungkin menjadi pemicu kecenderungan sebagian rumahtangga petani membeli beras. Suatu paradoks kaum tani kecil kontemporer.

Dari pengamatan sepintas saja bisa diketahui bahwa dengan jumlah penduduk bukan petani yang tidak terlalu besar, tidak sedikitnya jumlah warung yang menjual beras menunjukkan bahwa pada dasarnya banyak rumahtangga petani yang tidak sanggup lagi memenuhi kebutuhannya akan beras sepanjang tahun dari hasil produksinya sendiri.

Di samping itu, merebaknya praktik pembelian panen secara tebasan menciptakan paradoks baru perekonomian pertanian kecil. Tebasan membuat pasokan gabah di pasar meningkat tajam pada masa panen raya sehingga harga jual gabah di tingkat petani menjadi murah. Sementara itu pasokan gabah di tingkat rumahtangga atau desa susut dengan cepat. Seiring dengan berjalannya siklus produksi padi, pasokan gabah di pasaran menyusut menjelang panen musim berikutnya. Pada saat itulah harga gabah menjadi mahal daripada sebelumnya. Ironinya, petani menjual gabah saat harga jualnya rendah dan membeli beras saat harga jualnya tinggi (lihat Breman dan Wiradi, 2004; Boomgaard, 2002).

Dari keprihatian inilah muncul gagasan di kalangan lembaga swadaya masyarakat dan pemerhati kesejahteraan petani untuk mengembangkan suatu mekanisme pertahanan diri komuniti-

komuniti petani berlahan sempit dari tekanan sistem produksi kapitalistik yang melemahkan ketahanan pangan rumahtangga petani. Salah satu mekanisme ekonomi pertahanan diri secara kolektif yang digagas ialah bagaimana meningkatkan kemampuan petani menunda-jual panen. Kemampuan ini diharapkan bisa 1) mengurangi aliran gabah ke pasar pada satu waktu sekaligus yang menurunkan harga jual gabah di tingkat petani, 2) sehingga petani secara umum bisa menikmati harga gabah yang relatif ajeg sepanjang musim dan 3) meningkatkan daya tahan pangan rumahtangga petani, terutama terhadap beras, sehingga 4) bisa mengurangi ketergantungan petani kepada pasar dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan pokoknya.

Upaya-upaya memperkuat kapasitas tunda-jual dan daya tahan petani untuk tidak bergantung sepenuhnya kepada pasar sebetulnya sudah banyak dilakukan secara tradisional baik di tingkat rumahtangga maupun komuniti. Dalam upaya ini tidak sedikit sudah ada penciptaan lembaga-lembaga setempat, baik yang dikembangkan secara mandiri maupun yang kemudian didampingi baik oleh agen-agen pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat yang memiliki keprihatinan sama, yang membantu ke arah penguatan kapasitas tunda-jual dan daya tahan petani.

2. Produktivitas Agronomis dan Luasan Lahan Garapan

Di dalam pandangan sosiogeografis petani pedesaan di Jawa, sawah-tegalan-pekarangan merupakan tritunggal tradisional sumber-sumber penghidupan rumahtangga (Mulyanto, 2009; Collier, 1995). Apabila sawah ditempatkan sebagai sumber bahan pangan utama, beras; pekarangan dan tegalan ditempatkan sebagai sumber pasokan bahan bakar harian, pakan ternak, tambahan pangan, dan uang tunai.

Produktivitas Agronomis Sawah

Kapasitas menunda jual panen, baik pada tingkat rumahtangga maupun kelompok dipengaruhi, pertama-tama, oleh produktivitas agronomis sawah dalam menghasilkan bahan pangan maupun uang tunai bagi petani. Semakin produktif lahan, makin besar kemungkinannya untuk bisa memenuhi kebutuhan akan pangan dan uang tunai dengan menyisakan sebagian gabah disimpan untuk dijual kemudian pada saat-saat harganya tidak semurah harga panen raya. Namun, mesti ditekankan dari awal bahwa produktivitas agronomis ini merupakan sesuatu yang relatif terhadap luas penguasaan lahan dan komposisi rumahtangga petani.

Dalam menentukan perhitungan produktivitas agronomis sawah, digunakan patokan luasan lahan 1500 m^2 (*seprapat sanggem*) yang merupakan luas rata-rata kepemilikan lahan sawah di wilayah penelitian. Artinya, hitungan produktivitas bersifat rata-rata. Tingkatnya bisa berbeda-beda untuk luasan yang lebih kecil dan yang

lebih luas. Dalam beberapa hal, luasan rata-rata ini bisa menunjukkan seberapa luas lahan sawah yang semestinya dimiliki petani agar bisa melangsungkan kegiatan produktif sebagai petani.

Produktivitas lahan mencakup seberapa banyak panen yang bisa diperoleh ketika panen per petak lahan tertentu dan seberapa panjang jangka waktu lahan sanggup diolah menurut kapasitas agronomisnya. Produktivitas lahan sawah di kedua desa tineliti agak berbeda. Desa pertama di Kecamatan Simo mengenal tiga musim tanam (MT) dengan rata-rata petani hanya sanggup mengerjakan dua MT dan satu tambahan MT ketiga yang sifatnya untung-untungan bergantung kepada curah hujan pada akhir MT2. Sebabnya adalah tidak adanya saluran irigasi teknis masuk ke wilayah yang memang secara topografi lebih tinggi dari waduk yang sebetulnya hanya berjarak tak lebih dari 10 km di selatannya itu. Para petani lebih akrab dengan irigasi sumur tanah. Sementara itu desa kedua di Kecamatan Sambi yang dilalui oleh saluran irigasi teknis yang mengalirkan air hampir sepanjang tahun, rata-rata petani sanggup menanam sawahnya hingga MT3.

Di desa pertama, pada MT1 yang dimulai sekitar paruh kedua Desember hingga Maret, lahan pada umumnya ditanami padi jenis IR 64 atau Ciherang. Padi-padi jenis ini ditanam karena berdasarkan pengalaman menghasilkan cukup banyak gabah yang bisa disimpan sebagai cadangan bahan pangan rumahtangga, berumur pendek, dan, tentu saja, cukup laku di pasaran apabila hendak menukarnya dengan uang tunai. Dari lahan seluas 1500 m² (*seprapat sanggem*), bisa dihasilkan sekurang-kurangnya 20-25 *bagor* atau sekitar 700 kg gabah kering panen yang bisa dibawa pulang. Dari sawah seluas itu pula, rumahtangga yang memiliki ternak sapi bisa memperoleh cukup jerami yang bisa dikeringkan dan disimpan hingga tiga atau empat bulan ke depan.

Pada MT2 yang dimulai sejak pertengahan Maret atau beberapa minggu saja dari akhir MT1 hingga Juni, sebagian besar petani menanam jenis padi yang cocok untuk lahan tadah hujan yang agak kering. Banyak petani yang menanam jenis padi merah benih lokal (*sleggreng*) pada MT2. Sebenarnya, pada MT2 air cukup sulit, terutama untuk sawah-sawah di bagian desa yang agak berbukit. Sementara itu padi merah benih lokal justru bisa terganggu pertumbuhannya apabila terlalu banyak mendapatkan air. Buat padi merah benih lokal, cukuplah air banyak di minggu pertama penanaman, setelah itu satu-dua kali hujan sekitar satu atau dua jam bisa menghidupkan mereka hingga waktunya panen.

Selain karakter sawah tadah hujan yang memang cocok untuk tumbuhnya padi merah benih lokal, cukup banyaknya petani yang menanam padi tersebut ialah karena adanya saluran untuk menjual panennya. Tiga generasi petani sebelumnya mungkin menjadikan beras merah sebagai bahan pangan utama. Namun, generasi petani sekarang yang dilahirkan oleh Revolusi Hijau dengan padi umur pendek IR 64 atau Ciherangnya, kurang berminat mengkonsumsi beras merah sebagai bahan pangan sehari-hari. Di dalam orientasi budaya yang terbentuk sepanjang Revolusi Hijau, beras selain beras biasa IR 64 atau Ciherang bukanlah 'makanan pokok'. Fungsi beras merah menjadi setara dengan jagung, singkong, atau umbi-umbian yang diperlakukan sebagai 'makanan tambahan' atau makanan pendamping. Selain itu, seperti juga jagung atau singkong, beras merah ditempatkan di dalam golongan panen sumber perolehan uang tunai. Harga jual gabah merah yang relatif lebih tinggi dibanding beras biasa dan relatif stabil sepanjang tahun kian menegaskan kedudukannya sebagai sumber uang tunai rumahtangga.

Pada MT3 biasanya petani menanam *cash-crop* yang relatif cocok untuk jenis sawah tadah hujan. Di desa-desa di Kecamatan Simo, jenis *cash-crop* yang umumnya ditanam adalah kacang-

kacangan, terutama kacang tanah, dan jagung umur pendek. Sebagian petani hanya menanam kacang tanah atau jagung saja sepanjang MT3. Praktik ini bergantung kepada luasan lahan yang mereka kelola. Dari MT3 rata-rata petani dengan luasan lahan garapan 1500 m^2 (*seprapat sanggem*) bisa memperoleh uang tunai antara 1,5 sampai 2 juta rupiah.

Berbeda dengan desa pertama, sawah-sawah desa kedua di Kecamatan Sambi terbagi ke dalam tiga golongan: sawah irigasi teknis, sawah irigasi nonteknis, dan sawah tadah hujan. Hampir 30 hektar sawah yang tergolong irigasi teknis merupakan sawah bengkok yang dimiliki pemerintah desa. Sawah-sawah yang selalu tidak kesulitan mendapatkan pasokan air hampir sepanjang tahun ini umumnya digarap secara sewa. Sewa berlaku per musim lewat pelelangan yang terbuka bagi umum. Petani-petani penyewa yang sebagian datang dari desa-desa tetangga setidaknya harus menyediakan 1,5 sampai 2 juta per 1500 m^2 (*seprapat sanggem*); jumlah yang cukup mahal. Meski demikian peminat sawah-sawah bengkok milik desa tidak pernah surut dan mereka mengantri mendapatkan berkah limpahan gabah dari sawah yang konon tergolong paling produktif itu. Konon, sawah-sawah bengkok bisa menghasilkan 800 hingga 1000 kg gabah per 1500 m^2 atau 15 sampai 40% lebih banyak dari sawah-sawah tadah hujan pada umumnya.

Perangkat desa yang berhak mendapatkan lahan bengkok bukan hanya mereka yang ada di kantor desa. Dari kepala desa sampai ketua rukun tetangga memperoleh bagian sesuai dengan tinggi-rendah kedudukan tradisionalnya dalam susunan perangkat desa. Para ketua rukun tetangga yang mendapatkan jatah paling sedikit (*seprapat sanggem*), banyak juga yang menggarap sendiri lahan bengkoknya. Kecuali apabila mereka juga merangkap sebagai pegawai negeri atau sebelumnya memang petani kaya.

Secara geografis, sawah-sawah bengkok berada di sisi selatan

desa yang dilalui saluran irigasi tersier. Sementara sawah-sawah tadah hujan dan irigasi nonteknis berada di sisi utara desa. Sawah-sawah bengkok biasanya bisa ditanami padi untuk tiga musim tanam berturut-turut. Sedangkan sawah tadah hujan penduduk hanya bisa ditanami padi untuk dua musim saja (MT1 dan MT2). Karena sebagian besar sawah bengkok digarap lewat sistem sewa oleh petani penggarap dari luar desa dan sistem tebasan merupakan sistem panen yang berlaku lazim, penggambaran berikut dalam soal produktivitas lahan yang terkait dengan kapasitas tunda-jual lebih difokuskan kepada sawah-sawah yang digarap penduduk setempat yang umumnya tadah hujan dan irigasi nonteknis.

Pada MT1 dan MT2 rata-rata penduduk menanam sawahnya dengan padi jenis IR 64 atau Ciherang. Sejak beberapa tahun lalu, sejak terbentuknya kelompok tani yang didampingi oleh sebuah LSM setempat, beberapa petani menanam sawahnya dengan padi aromatik Mentik Wangi dan Sintanur pada MT2. Petani-petani yang tidak terlibat aktif di dalam kelompok tani meski namanya tercatat karena kepentingan mendapat pupuk bersubsidi, tetap menanam IR 64 atau Ciherang pada MT2. Sebagian beralasan jumlah dan kualitas gabah padi aromatik kurang baik. Kekurangan yang dianggap melekat pada padi aromatik mungkin sebetulnya lebih disebabkan oleh pengetahuan akan teknik pemeliharaan yang belum memadai bagi sebagian besar petani sehingga ada kemungkinan pada masa depan popularitas padi aromatik akan meningkat seiring dengan kian lancarnya arus informasi dari pemerintah dan, terutama, LSM pendamping mengenai teknik dan resep pemeliharaannya.

Pada MT3 yang sudah mulai menghadapi kesulitan air, sebagian petani menanam sawahnya dengan cash-crop seperti kacang tanah dan jagung umur pendek. Beberapa lainnya menanam kacang kedelai.

Sebagai tambahan, sepanjang MT1 dan MT2 pematang juga biasanya ditanami tanaman pangan seperti singkong, gambas, talas, atau kacang panjang. Meski sebagian orang tidak memandang tanaman-tanaman tersebut secara ekonomis, namun hasil yang bisa diperoleh dari penanaman pematang lumayan menambah pasokan bahan pangan nonberas dalam menu makanan sehari-hari. Selain itu, tanaman tegalan yang dibawa ke pematang itu bisa juga mendatangkan uang tunai. Dari satu petak sawah ukuran sedang yang tiga larik pematangnya ditanami, seseorang petani bisa mendapatkan sekitar 150 ribu rupiah dari penjualan singkong.

Dari pengamatan dan penilaian sepintas, sebetulnya produktivitas lahan sawah di kedua desa boleh dikatakan cukup tinggi sehingga memungkinkan rumahtangga petani menyimpan panennya cukup lama hingga panen musim berikutnya. Setiap akhir musim tanam, ada cukup banyak gabah yang bisa dibawa pulang, baik oleh penggarap maupun buruh-buruh tani yang mememanennya. Sepanjang tahun setidaknya dua kali petani menuai padi, dan sekali memanen kacang-kacangan atau jagung dari sawahnya.

Persoalan yang dihadapi petani jaman sekarang tidak seperti persoalan yang dihadapi mereka pada dasawarsa 1960-an. Persoalannya bukan lagi pada tingkat produktivitas sawah, tetapi rata-rata luasan lahan garapan pada satu sisi, dan sulitnya upaya memperluas lahan sawah, baik secara administratif maupun secara ekologis, pada sisi lain. Meski belum ada survei rinci tentang luas kepemilikan lahan garapan, namun dari berbagai perbincangan dan wawancara sambil lalu bisa dikatakan bahwa sebagian besar rumahtangga petani hanya menggarap tak lebih dari 1500 m². Tentu saja ada rumahtangga yang memiliki lahan dengan luas dua atau tiga kali lipat dan tidak sedikit pula yang hanya menggarap setengah atau kurang dari luasan tersebut.

Hampir tidak ada opini di antara petani yang menghendaki perluasan fisik lahan sawah sebagai jalan keluar dari keterbatasan luas garapan rata-rata. Lebih banyak opini mengarah ke pemanfaatan lahan-lahan sawah bengkok yang dikuasai aparat desa dan sawah desa sebagai institusi menjadi sawah-sawah garapan bagi penduduk yang sempit garapannya.

Selama ini, di kedua desa, lahan sawah bengkok merupakan satu-satunya kategori lahan yang berada di pasar lahan secara sempurna. Selain perangkat desa yang rendah kedudukannya sehingga hanya mendapat lahan garapan bengkok kurang dari 1500 m² saja yang menggarap sendiri lahan sawah bengkoknya. Selebihnya, terutama dari kepala desa hingga kepala dusun, menyewakan lahan bengkok mereka lewat pasar terbuka. Prasyarat penyewaan lahan-lahan bengkok ini pembayaran uang sewa di muka. Ada yang perhitungannya per tahun, ada pula yang per musim. Setidaknya seseorang harus mengeluarkan uang tunai sejumlah 1 sampai 1,5 juta per *seprapat sanggem* per tahun (sekitar 8-10 juta per hektar per tahun). Inilah salah satu sebab selama ini hanya perusahaan gula dan petani-petani dari luar desa yang cukup kaya yang sanggup menyewa lahan-lahan tersebut. Karena tingginya kebutuhan akan uang tunai untuk penggarapan lahan-lahan sewaan ini, maka umumnya di wilayah hamparan yang sebagian besar digarap lewat sewa, *tebasan* merupakan praktik jual panen yang umum.

Produktivitas Pekarangan dan Tegalan

Dalam konteks kapasitas tunda-jual gabah, faktor produktivitas pekarangan dan tegalan mempengaruhi kesanggupan rumahtangga mendapatkan bahan-bahan penunjang kehidupan rumahtangga, baik yang terkait dengan kebutuhan sehari-hari maupun, dan terutama, dengan kebutuhan di masa depan atau kebutuhan mendadak yang memerlukan uang tunai cukup besar.

Pekarangan menyediakan lahan bagi petani untuk memelihara cukup banyak bahan pemenuh kebutuhan rumahtangga petani (Soemarwoto dan Conway, 1992). Di kedua desa, petani menanam pekarangan yang masih lowong dengan pohon jati lokal yang dipersiapkan untuk kebutuhan-kebutuhan masa depan seperti kayu untuk membuat atau memperbaiki rumah atau kandang ternak, atau untuk dijual. Selain jati lokal, buah-buahan seperti mangga dan rambutan yang bisa mendatangkan uang tunai antara 250 hingga 2 juta rupiah per musim panen bergantung banyaknya pohon yang ditanam. Buah paling populer seperti pisang juga lumrah ditanam. Pisang ditanam terutama untuk memenuhi kebutuhan sosial dalam kehidupan pertetangga dan kekerabatan. Bersama beras, pisang merupakan 'matauang sosial' yang menjadi pengikat hubungan sosial antartetangga dan antarkerabat lewat pranata "pemberian-pemberian" seremonial untuk upacara pernikahan.

Tidak jarang sebagian lahan pekarangan dijadikan sepetak kecil untuk kebun akar-akaran dan sayur seperti jahe, lengkuas, cabe dan sebagainya yang ditanam untuk memenuhi kebutuhan harian rumahtangga.

Selain ditanami tetanaman, pekarangan juga tempat petani memelihara ternak kecil paling populer: ayam atau kelinci, dan juga ternak besar seperti sapi atau kerbau. Kepemilikan akan cadangan uang tunai yang memadai dan kesanggupan memasuki saluran pemasaran yang menjadikan kegiatan berternak sebagai usaha produktif yang menghasilkan pemasukan bagi pendapatan rumahtangga. Apabila tidak ada kedua prasyarat ini, kegiatan di pekarangan sekadar kegiatan tradisional seperti yang selama ini sudah dilakukan generasi sebelumnya.

Dalam konteks kapasitas tunda-jual, produktivitas pekarangan dan tegalan merupakan salah satu yang berpengaruh. Bagi rumahtangga petani kecil, pekarangan bisa menjadi sumber uang

tunai tambahan. Keberadaan tanaman tahunan di pekarangan menjadi semacam jaminan masa depan atau tabungan yang merupakan tameng dari krisis perekonomian di tingkat rumahtangga. Tanaman pangan di pekarangan atau tegalan juga menjadi pangan penyela atau tambahan terhadap beras sehingga bisa mengurangi kebutuhan, meski tidak begitu berarti, akan konsumsi beras.

Persoalannya tidak semua rumahtangga mengolah lahan pekarangan sehingga produktif dalam arti bisa memberikan masukan yang relatif rutin kepada pendapatan rumahtangga. Belum banyak rumahtangga yang memanfaatkan pekarangan untuk usaha produktif yang sebetulnya tidak memerlukan lahan yang terlampau luas seperti budidaya ikan-ikanan atau budidaya ternak kecil seperti kelinci. Dari bincang-bincang dan pengamatan terhadap keluarga yang memiliki usaha budidaya ikan dan kelinci, tampaknya komposisi rumahtangga punya pengaruh penting.

3. Ongkos Produksi dan Kebutuhan Sosial

Tunda-jual Gabah dan Ongkos Produksi

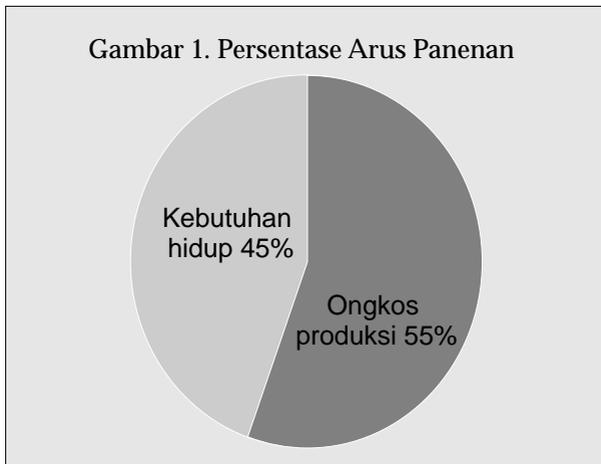
Kapasitas petani menunda jual dipengaruhi oleh seberapa tinggi kebutuhan menjual gabah dalam kaitannya dengan ongkos produksi. Tentu saja sumber pembiayaan produksi bisa saja bukan melulu dari penjualan gabah. Tetapi, karena bagi kebanyakan rumahtangga di kedua desa, sawah merupakan sumber pendapatan utama, maka boleh diandaikan secara moderat bahwa mereka pasti menjual gabah panen untuk mendapatkan uang tunai yang kemudian digunakan sebagai alat pembayaran kebutuhan produksi.

Perhitungan berikut ini didasarkan kepada asumsi bahwa rata-rata rumahtangga tani di kedua desa menggarap 1500 m² sawah. Meski ada juga yang menggarap setengah dari luasan itu atau tiga sampai empat kali lipat dari luas rata-rata tersebut, namun istilah '*seprapat sanggem*' merupakan istilah baku untuk mengukur atau menilai kebutuhan benih, pupuk, tenaga kerja, dan hasil panen. Semua biaya dikonversikan ke dalam berat gabah kering untuk memudahkan perhitungan yang melampaui perubahan atau penurunan nilai matauang.

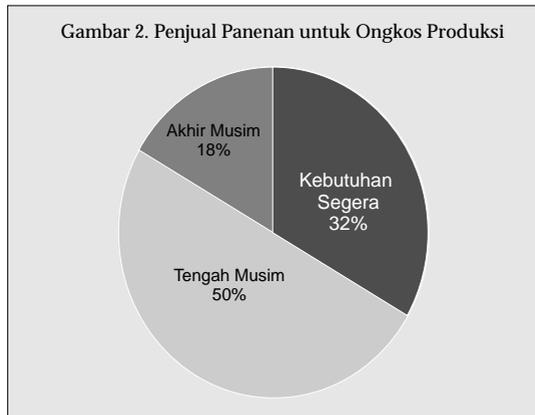
Hasil produksi rata-rata tertinggi untuk MT1 per 1500 m² sekitar 700 kg gabah basah atau sekitar 600 sampai 650 kg gabah kering panen. Dengan asumsi harga jual gabah kering panen rata-rata adalah Rp. 2500,-/kg, dari hasil MT1 tersebut kebutuhan akan penjualan gabah panen untuk ongkos produksi MT2 adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan segera (ks) untuk biaya benih, ongkos traktor, dan upah buruh tanam sekitar 124 kg gabah kering atau 32% dari total kebutuhan penjualan gabah kering untuk produksi;
2. Kebutuhan tengah musim (tm) untuk pupuk, obat, upah penyiangan sekitar 189 kg gabah kering atau 49%;
3. Kebutuhan akhir musim (am) untuk upah panen sekitar 71 kg gabah kering atau 18%;

Keseluruhan jumlah gabah kering yang harus dikeluarkan untuk ongkos produksi sekitar 384 kg atau sekitar 55% hasil produksi MT1. Selebihnya, sekitar 45% atau 315 kg gabah kering bisa ditunda jual untuk simpanan pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang berangsur-angsur dikeluarkan.

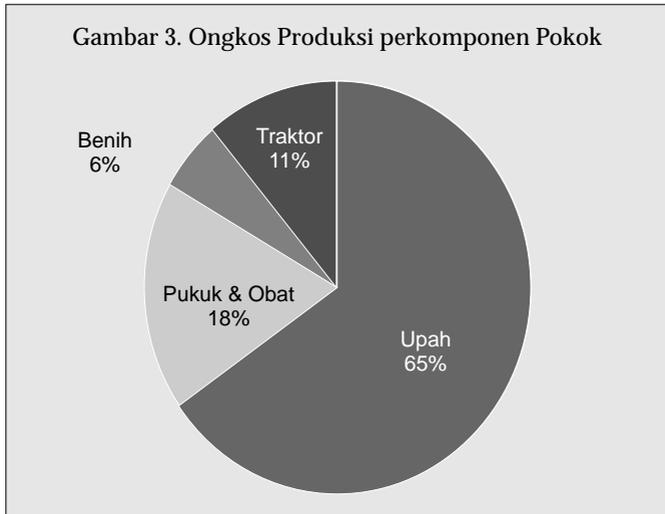


Kebutuhan akan penjualan gabah untuk memperoleh uang tunai yang segera untuk ongkos produksi mencakup 32% dari total kebutuhan atau 122 kg gabah kering. Jumlah ini berarti sekitar 17% dari total hasil panen harus segera dijual. Artinya ada sekitar 83% panen yang bisa disimpan. Dilihat sepintas proporsi yang harus segera dijual tidaklah besar. Namun mengikuti pertumbuhan padi, ongkos-ongkos lain harus dipenuhi sehingga sepanjang 100 sampai 110 hari masa tanam padi, ada masa-masa ketika banyak gabah dijual untuk memenuhi kebutuhan uang tunai ongkos produksi. Itulah sebabnya kebiasaan mengeringkan dan menyimpan hasil panen pada tingkat rumah tangga, terutama pada rumah tangga berlahan sempit, lebih didorong oleh bayangan masa depan yang pendek akan kebutuhan menjual gabah demi keberlangsungan produksi pertanian.



Berdasarkan komponen produksi, dari 384 kg gabah kering panen untuk ongkos produksi, sekitar 65% atau 250 kg gabah kering harus dikeluarkan untuk upah buruh, 70 kg atau 18% untuk pupuk dan obat, 24 kg atau 6% untuk benih, dan 40 kg atau 10% untuk sewa traktor.

Gambar 3. Ongkos Produksi perkomponen Pokok



Di sini tampak komponen upah merupakan yang terbesar. Bagaimanapun, pertanian padi tergolong usaha padat karya. Kebutuhan akan tenaga kerja cukup tinggi. Terutama pada masa-masa paling pokok seperti tanam dan panen karena keduanya memerlukan kesegaraan dalam berpacu menghadapi sifat dasar tanaman padi, perubahan cuaca, dan pasokan air. Tidak serempaknya waktu tanam padi di kedua desa tidak hanya ditentukan ketersediaan air. Banyak kasus menunjukkan bahwa ketidakserempakan itu terjadi di antara petak-petak sehampanan yang mempunyai akses yang sama ke air pasokan. Salah satu alasan ketidakserempakan waktu tanam ialah ketersediaan buruh tani. Pada masa panen pun demikian. Saat padi sudah cukup matang untuk dipanen, bisa saja petani membiarkan beberapa hari lagi. Tetapi pembiaran ini akan cukup berbahaya apabila disertai perubahan cuaca yang dikenali akan bisa merusak atau setidaknya mengurangi kualitas dan jumlah panen apabila ditunda lebih lama. Oleh karena itu ketersediaan tenaga kerja sesegera dibutuhkan merupakan faktor penting keberhasilan panen.

Meski pertanian padi merupakan kegiatan padat karya, namun kebutuhan akan tenaga kerja tidaklah ada sepanjang waktu. Selain tanam dan panen, sebagian besar kerja-kerja pertanian bisa dikerjakan oleh satu atau dua orang saja. Itulah sebab yang menjadikan kerja-kerja pertanian hanya salah satu pilihan saja bagi anggota rumahtangga buruh tani. Apabila ada sumber pendapatan lain di luar desa antara rentang masa tanam dan panen, migrasi sementara umum dipilih sebagai jalan keluar bagi pendapatan rutin rumahtangga. Di kedua desa, *mboro* ke kota-kota seperti Jakarta, Bogor, Jogjakarta, Surakarta, dan lain-lain untuk mendapatkan uang tunai dari kerja sebagai buruh bangunan sudah berlangsung sebagai kebiasaan sejak lama di antara rumahtangga petani miskin. Hingga sekarangpun pemandangan sehari-hari di kedua desa didominasi oleh lalu-lalang dan berkegiatannya perempuan-perempuan tua-muda yang membersihkan pekarangan, menjemur gabah, bekerja di sawah, atau berkumpul di kegiatan kelompok pertetanggaan.

Tidak semua kerja upahan pertanian dibayar dengan uang. Kerja-kerja pertanian yang secara kebiasaan dibayar sepenuhnya dengan uang hanya meliputi traktor (*ngluku*), mencangkul (*macul*), mengangkut dan menyebar pupuk. Sementara itu, tanam (*tandur*), menyiangi (*matun*), dan panen pada umumnya dibayar dengan gabah. Di Desa pertama kebiasaan lama *rewangan* masih dipraktikkan. Penggarap sawah biasa menerima usulan tetangganya yang sesama penggarap untuk bekerja pada salah satu kerja pertanian, entah menyiangi atau tanam. Orang-orang yang bekerja tidak diupah segera, tetapi dibayar dengan hak untuk ikut panen dan mendapatkan *bawon* atau bagian sebanyak 3 *bojok* (sehari). Pemanen yang sebelumnya tidak ikut tanam atau tandur, hanya mendapatkan 1,5 *bojok*.

Kebiasaan *rewangan* merupakan salah satu tampilan dari jalinan 'hutang' sosial yang mengikat rumahtangga-rumahtangga sepertetanggaan satu sama lain secara ekonomis. Jalinan hubungan tatap muka antartetangga ini terpelihara melalui banyak kebiasaan

yang menjadi sarana reproduksi identitas diri dan sosial sebagai satu kelompok sekepentingan atau sekegiatan bersama. Itulah sebabnya *rewangan* hanya bisa diajukan kepada sesama tetangga dekat yang meliputi satu rukun tetangga atau baris perumahan yang sama. Kebiasaan *rewangan* dan kebiasaan-kebiasaan lain yang akan diulas pada bagian lain laporan ini, menjadi modal penting untuk membangun kelompok dan melembagakan bentuk-bentuk organisasi yang terkait dengan lumbung pangan kolektif.

Bagi rumahtangga miskin, panen yang diupah gabah bawonan lewat lembaga *rewangan* merupakan salah satu sumber tambahan yang berarti untuk pasokan gabah rumahtangga yang berguna sebagai cadangan uang tunai kecil-kecilan maupun untuk cadangan biaya sosial memenuhi kewajiban-kewajiban sosial yang memerlukan beras.

Meski tidak ada ketentuan baku tentang siapa dan berkategori sosial apa yang bisa mengajukan tawaran kerja *rewangan*, pada umumnya buruh-buruh tani yang ikut kerja *rewangan* adalah perempuan. Kalaupun ada laki-laki yang turut serta, tampaknya yang sering tampak ialah laki-laki setengah baya. Mungkin sekali hal ini terkait dengan kebiasaan *mboro* atau mencari pekerjaan bangunan di kota-kota besar di Jawa di antara anggota rumahtangga laki-laki yang berusia relatif muda. Selain itu, tanggung jawab anggota perempuan dewasa dalam rumahtangga ialah memastikan pasokan atau cadangan bahan pangan, terutama beras, tersedia sepanjang waktu diperlukan.

Opini di antara buruh-buruh panen selalu mengutamakan lembaga *rewangan* dan upah bawon dibandingkan sistem panen tebasan yang marak di bagian lain desa. Bagi mereka, tebasan menutup kemungkinan untuk mendapatkan gabah tambahan. Tentu saja buruh-buruh tani tidak harus dibayangkan sebagai segolongan kaum tani tanpa lahan garapan sama sekali. Di kedua desa, tampaknya hampir semua rumahtangga memiliki lahan garapan, meski sebagian

besarnya tidak lebih dari 1000 m². Oleh karena itu sistem bawon bisa sedikit menutupi kekurangan pasokan cadangan gabah rumahtangga dari sawah sepetak mereka dan sistem tebasan yang ditakutkan tambah meluas merupakan lembaga, yang meskipun sudah akrab sejak dasawarsa 1980-an akhir, bisa menutup sepenuhnya sumber pasokan tersebut.

Dari amatan di kedua desa, tebasan umumnya diorganisasi oleh mandor-mandor penebas yang sebagian besar merupakan wakil dari pabrik penggilingan beras dari wilayah kota kecamatan. Bahkan ada yang datang langsung sebagai utusan juragan beras dari Delanggu atau Klaten. Pada umumnya mandor penebas membawa sendiri pemanen yang terdiri dari laki-laki yang kadangkala merangkap juga sebagai pekerja upahan di pabrik penggilingan beras besar.

Tunda-jual Gabah dan Kebutuhan Sosial

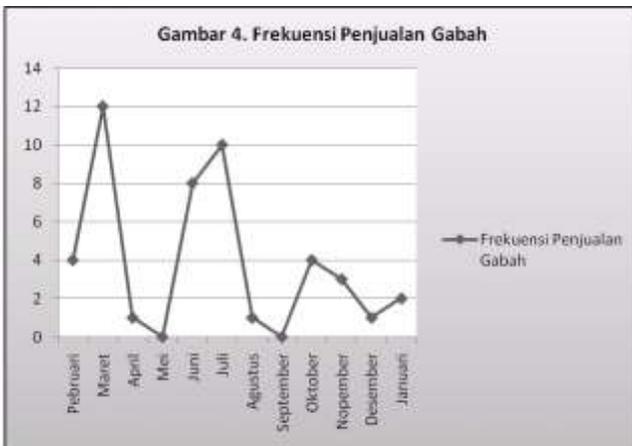
Selain ongkos produksi, kapasitas tunda-jual petani juga dipengaruhi oleh kebutuhan hidup rumahtangga dan kebutuhan memenuhi kewajiban sosialnya sebagai warga komuniti yang terkait langsung dengan keberadaan gabah atau beras.

Dengan sisa 315 kg gabah kering, sebuah rumahtangga bisa mendapatkan 199 kg beras yang bisa menunjang kebutuhan beras untuk 132 hari dengan asumsi sebuah rumahtangga dengan 6 anggota yang membutuhkan 1,5 kg beras per hari. Tentu saja kebutuhan pokok rumahtangga bukan hanya beras, tetapi juga lauk-pauk, bumbu masak, minyak goreng, bahan bakar, dan sebagainya yang memungkinkan menjalani hidup sebagai rumahtangga normal. Di luar kebutuhan pokok rumahtangga, keluarga-keluarga petani juga harus menjual panenannya untuk membayar biaya pendidikan anak, ongkos perbaikan rumah, kesehatan, upacara ritus peralihan, dan sebagainya. Itulah sebabnya tidak sedikit rumahtangga menjual simpanan gabahnya secara bertahap. Besaran penjualan ini seringkali

tinggi pada bulan-bulan tertentu sehingga simpanan gabah yang dipunyai bisa habis sebelum panen MT2 menjelang (sekitar 100 hari pasca panen MT1).

Dari data yang diperoleh dari tengkulak setempat setingkat ketetangga yang biasanya menerima pembelian gabah kering dari rumahtangga-rumahtangga dalam rentang satu kampung atau dukuh, diperoleh keterangan sebagai berikut: sepanjang Pebruari 2009 hingga Januari 2010, ada sekitar 46 transaksi penjualan gabah dari penduduk sekitar. Dari ke-46 transaksi, transaksi puncak terjadi pada bulan Maret dengan 12 transaksi yang meliputi sekitar 2,7 ton dan bulan Juli dengan 10 transaksi yang meliputi 2,5 ton gabah kering.

Transaksi tertinggi pada bulan Maret dan Juli kemungkinan besar terkait dengan masa puncak panen gabah MT1 dan MT2. Baik Maret maupun Juli merupakan bulan panen sekaligus bulan tanam untuk musim tanam berikutnya. Rentang antara panen MT1 dengan masa tanam MT2 dan antara panen MT2 dengan tanam MT3 biasanya tidak lebih dari sebulan. Karena sekitar 32% hasil panen MT sebelumnya 'harus' dijual untuk ongkos produksi MT berikutnya, maka penjualan tinggi pada Maret dan Juli bisa dipahami.



Tingginya penjualan gabah ke tengkulak sepanjang Maret dan Juli bukan hanya bisa dilihat dari frekuensi, tetapi juga dari besaran yang dijual. Sepanjang Maret 2009 lalu tercatat sejumlah 2,7 ton gabah dijual dan pada Juli ada sekitar 2,5 ton gabah dijual ke tengkulak setempat dengan rata-rata transaksi sekitar 2 kuintal. Artinya, bukan kebutuhan rumahtangga sehari-hari yang mendorong besarnya penjualan gabah pada dua bulan ini.

Sementara itu, rendahnya penjualan gabah pada bulan Mei dan September mungkin terkait dengan puncak kelangkaan gabah di simpanan rumahtangga. Mei merupakan puncak paceklik MT2 ketika cadangan gabah rumahtangga biasanya hampir kosong. Kerja-karya yang diupah gabah pun sulit didapat kecuali harus melanglang ke kecamatan-kecamatan lain atau menunggu beras bantuan pemerintah untuk rumahtangga miskin (*raskin*).

Dari data yang didapat dari tengkulak setempat, harga gabah terendah ada pada bulan Maret dan Juni. Sementara itu harga gabah tertinggi ada pada bulan Nopember dan Desember. Dibandingkan dengan data frekuensi penjualan, justru pada bulan-bulan Maret dan Juni tingkat penjualan ke tengkulak setempat termasuk yang tertinggi dan tingkat penjualan pada bulan Nopember dan Desember termasuk terendah.



Secara nominal ada peningkatan sekitar 50 hingga 65 persen harga jual dari harga terendah pada bulan Maret dan Juni dengan harga jual gabah dengan harga tertinggi pada bulan Nopember dan Desember. Artinya, mereka yang sanggup menunda jual sebagian gabah keringnya hingga bulan Nopember atau Desember akan mendapatkan perolehan uang tunai lebih banyak daripada mereka yang tidak sanggup melakukannya. Dengan demikian penguatan kapasitas tunda jual, baik di tingkat rumahtangga maupun di tingkat komunitas melalui lembaga lumbung simpan bersama, cukup berarti dalam menambah kekuatan daya tawar dan perolehan harga yang adil bagi petani.

Persoalannya, tidak semua rumahtangga sanggup menunda jual hingga puncak paceklik. Hanya sebagian kecil rumahtangga petani yang bisa mendapat keuntungan dari puncak paceklik, yaitu mereka yang mempunyai sumber pendapatan uang tunai di luar penjualan gabah. Bagi mereka yang mengandalkan pemenuhan ongkos produksi dan kebutuhan hidup dari menjual gabah, menunda jual hingga puncak paceklik sulit dilakukan.

Di luar kebutuhan ongkos produksi dan kebutuhan sehari-hari rumahtangga, dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa pendorong penjualan gabah yang meninggi pada bulan-bulan tertentu dan merendah pada bulan-bulan lainnya ialah kebutuhan sosial yang terkait dengan tradisi atau adat-kebiasaan setempat, terutama yang terkait dengan ritus peralihan.

Ada dua ritus peralihan terpenting di dalam kehidupan komunitas, yaitu kematian dan perkawinan. Kedua-duanya penting dalam kaitannya dengan kebutuhan akan beras yang tinggi, baik bagi penyelenggara maupun bagi tetangga mereka. Dalam kebiasaan setempat, setiap rumahtangga yang sedang menyelenggarakan upacara perkawinan berhak mendapatkan 1 *bojok* beras (sekitar 8 kg) dari tetangga sedesa dan dua kali lipatnya dari kerabat yang tinggal

sedesa. Begitu pula dengan upacara kematian. Bedanya dalam upacara perkawinan beras juga disertai hasil tani dari pekarangan, terutama pisang.

Dengan asumsi setiap rumahtangga menerima kabar kematian 6 kali dalam setahun dan mendapat undangan 6 kali upacara perkawinan tetangga atau kerabat, maka kebutuhan beras untuk kebutuhan sosial tersebut per rumahtangga adalah 96 kg beras atau setara dengan sekitar 152 kg gabah kering per tahun. Jumlah ini cukup berarti karena mencakup sekitar 21% dari total perolehan panen padi semusim dengan asumsi luasan lahan garapannya 1500 m². Rumahtangga yang luas lahan garapannya kurang dari itu pasti mengalami cukup kesulitan menyisihkan 21% hasil panen untuk cadangan pemenuhan kebutuhan sosial tersebut.

Meski demikian, dilihat dari sisi lain, bagi penyelenggara upacara, kebiasaan setempat ini bisa menjadi sumber perolehan cadangan beras baru tanpa melalui pasar, terlebih bagi rumahtangga miskin, kebiasaan setempat ini merupakan sumber hiburan bagi cadangan beras mereka. Apabila seseorang memelihara hubungan sosial yang baik sesuai dengan harapan sosial setempat dengan banyak tetangga dan kerabat, tidak jarang kebiasaan memberi beras kepada rumahtangga yang tertimpa kemalangan meninggalnya salah satu anggota keluarga ataupun kepada rumahtangga yang mengadakan upacara pernikahan bagi anaknya ini bisa banyak menutupi ongkos yang mesti mereka keluarkan bagi kedua peristiwa tersebut. Dalam beberapa kasus, keluarga petani yang aktif di dalam kegiatan kolektif kampung, kelebihan beras yang didapat setelah dikurangi biaya upacara bisa mencapai 2 sampai 3 kuintal.

Dengan pengalaman-pengalaman seperti ini penduduk melihat adat kebiasaan memberi beras bagi tetangga atau kerabat dekat yang menyelenggarakan pernikahan anak atau tertimpa musibah meninggalnya anggota keluarga sebagai sejenis *arisan beras* yang

pada gilirannya akan sampai pada mereka untuk menuai investasi sosial mereka selama ini.



Tidak seperti kematian yang tidak bisa ditebak waktunya, sudah lumrah di pedesaan Jawa bahwa upacara perkawinan biasanya lebih ramai pada bulan-bulan tertentu dalam satu tahun. Meski perhitungan numero-astrologis yang secara formal masih dikenal dalam menentukan waktu penyelenggaraan perkawinan, penentuan akhir biasanya ditentukan oleh kesibukan kerja-kerja dalam pertanian. Bulan-bulan panen merupakan masa yang biasanya dipilih untuk menyelenggarakan upacara perkawinan. Perhitungannya, selain pada masa itu rumahtangga penyelenggara sudah merampungkan kerja pertanian yang menyita waktu, tenaga, dan biaya, pada bulan panen para undangan yang sebagian besar adalah tetangga dan kerabat bisa memenuhi kewajiban sosial memberikan beras dan beberapa pemberian lain yang bisa diperoleh dengan menukar gabah dengan uang tunai.

4. Tebasan dan Soal Agraria

Tebasan merupakan praktik pasar terpenting yang menggerogoti kapasitas tunda-jual petani. Karakteristik utama dan latar dari tebasan ialah luas dan penguasaan lahan. Di wilayah-wilayah yang banyak lahan sawah dimiliki oleh orang dari lain kecamatan dengan sewa-tunai sebagai saluran penguasaannya, tebasan merupakan satu-satunya mekanisme panen. Sewa-tunai sebetulnya hubungan produksi baru. Dari ingatan penduduk, sewa-tunai yang mewajibkan penyewa membayar sejumlah tertentu uang satu atau dua musim sebelum hak sewa diserahkan, baru marak akhir dasawarsa 1980-an. Sewa-tunai berarti penggarap harus memiliki sejumlah tertentu uang tunai sebelum memperoleh manfaat dari lahan sewaan. Oleh karena itulah tingkat kebutuhan akan uang tunai dalam jumlah besar sangat tinggi di kalangan penggarap sewa. *Tebasan*, salah satunya, merupakan jalan keluar bagi para penyewa untuk sesegera mungkin mendapatkan uang tunai sebelum musim tanam berikutnya mulai.

Pada tingkat kasus, tebasan biasanya lebih disukai petani kaya atau juga petani yang tidak lagi mempunyai sumberdaya tenaga kerja memadai karena perubahan siklus usia rumahtangga. Siklus usia mengubah jumlah dan komposisi anggota rumahtangga. Seorang petani duda atau janda yang anak-anaknya sudah dewasa dan tidak lagi menerjuni pertanian (menjadi pegawai negeri, karyawan, atau pengusaha di kota) umumnya memilih tebasan untuk menjual panen. Bagaimanapun, tunda-jual memerlukan pengerahan tenaga kerja tersendiri. Petani harus mengangkut panen ke rumah,

menjemur gabah hingga mencapai kekeringan tertentu sehingga layak disimpan, lalu menyediakan tempat di rumahnya untuk menyimpan. Dengan alasan-alasan di ataslah petani tua yang tidak bisa lagi mengerahkan sumberdaya internal rumahtangganya memilih tebasan.

Di kedua desa, praktik tebasan juga dikenal. Beberapa orang mandor tebasan yang sering mendatangi desa juga dikenal. Di beberapa tempat di dalam desa, sawah-sawah tertentu sawah bengkok dan *banda desa* pada umumnya jika tidak disewakan kepada pabrik gula untuk penanaman tebu pasti disewakan dengan sistem sewa tunai kepada penggarap-penggarap dari luar desa. Di sawah-sawah sewa ini tebasan bukan hanya merupakan kelaziman, tetapi keharusan adaptif terhadap sistem sewa itu sendiri. Meski demikian, sebagian besar petani kecil memilih memanen sendiri.

Praktik tebasan mempengaruhi kapasitas tunda-jual secara umum pada dua hal: pertama, tebasan mengurangi kesempatan rumahtangga petani miskin yang juga biasanya adalah pekerja-pekerja pedesaan untuk mendapatkan bawon berupa gabah. Salah satu sumber pasokan cadangan gabah rumahtangga petani miskin ialah upah berupa gabah dari sawah yang dipanen. Hampir semua mandor penebas ialah bagian dari jaringan bisnis pedagang beras yang membawa sendiri buruh-buruh pemanen. Kalaupun tidak sistem upah pekerja tebasan umumnya uang tunai. Hal ini cukup rasional dari sudut pandang penebas. Sebagai usaha kapitalistik, efektivitas dan efisiensi merupakan nilai terpokok. Kecepatan dan ketepatan panen tidak hanya ditentukan oleh sistem upah harian, tetapi juga oleh pasokan tenaga kerja yang siap sedia dikerahkan saat dibutuhkan. Menggantungkan diri kepada pekerja-pekerja upahan setempat mengandung resiko tidak tersedianya pasokan tenaga kerja yang cukup pada waktu yang tepat.

Kedua, tebasan memperlancar aliran keluar panen dari desa dan meningkatkan ketergantungan penduduk desa pada umumnya

kepada asupan bahan pangan dari luar. Warung-warung serta toko kebutuhan pokok yang ada di dua desa juga ditemukan menjual beras yang dipasok dari pasar kecamatan setempat. Artinya, kebutuhan akan beras dari luar cukup tinggi meski tidak sepanjang tahun frekuensinya penjualannya tinggi. Namun keberadaan warung yang menjual beras yang dipasok dari pasar kecamatan tentu saja tidak hanya menunjukkan paradoks petani yang memproduksi gabah dan membeli beras. Bisa juga karena populasi non-petani di kedua desa cukup tinggi.

Perubahan-perubahan di dalam peri-penghidupan serta orientasi ekonomi kepada sumber-sumber pendapatan rumahtangga nonpertanian, terutama kerja-kerja upahan sebagai buruh pabrik atau pegawai negeri atau menjadi penebas yang kini menjadi sesuatu yang lumrah di pedesaan Jawa membantu memperluas cakupan praktik tebasan. Pada masa depan petani-petani berlahan sempit yang menjadi satu kesatuan ekonomi karena sawahnya sehamparan bisa saja melepaskan kebiasaan memanen sendiri dengan sistem bawon dan menjual panen setelah mengeringkan dan menyimpannya beberapa waktu. Siklus rumahtangga yang setengah karena alamiah dan setengah lagi karena perubahan orientasi peri-penghidupan pada banyak kasus yang ditemui, merupakan salah satu pendorong petani menjual secara tebasan.

Seperti sudah diulas pada bagian terdahulu, pada dasarnya produktivitas sawah di kedua desa cukup tinggi. Setidaknya petani bisa memanen 6-7 ton gabah per hektar. Di sawah-sawah yang tergolong lebih subur dengan pasokan air yang mencukupi, tidak jarang yang bisa mencapai hingga 8 ton per hektar. Namun, karena penguasaan lahan di kebanyakan rumahtangga petani hanya 1000-1500 m², maka seproduktif apapun sawahnya, hasil yang bisa ditahan untuk tidak segera dijual menjadi sedikit. Kemungkinan untuk mempertahankan panen untuk tidak dijual secara tebasan hanya bisa dilakukan karena adanya sumber-sumber pasokan uang tunai dari luar gabah.

5. Lumbung Paceklik, *Sense of Crisis* dan Peran Perempuan

Lumbung Paceklik

Pertetanggaan yang terpelihara dengan baik menciptakan hubungan tatap muka yang tidak hanya memperjelas kedudukan sosial masing-masing rumahtangga di dalam komunitas setempat, tetapi juga memelihara perhatian kepada sesama penghuni ruang ketetanggaan. Tiap-tiap keluarga mengetahui keadaan perekonomian tetangganya, meski tidak semua diharapkan bisa ikut menangani peraalannya. Meski demikian, pertemuan-pertemuan berkala di antara kelompok pertetanggaan secara sosiologis memungkinkan arus informasi yang dibawa dari perjumpaan harian menjadi lebih berguna dalam menangani permasalahan bersama.

Di kedua desa, ditemukan praktik lumbung paceklik yang berfungsi sebagai sarana penyediaan gabah pinjaman untuk anggota kelompok pertetanggaan yang cadangan gabahnya habis atau hampir habis sebelum masa panen berikutnya. Lumbung paceklik ini juga menjadi sumber pendanaan kolektif untuk keperluan membeli barang kebutuhan bersama di tingkat dukuh atau rukun tetangga. Dari bentuk dan penuturan tetua desa, lembaga ini sudah dipraktikkan setidaknya sejak dasawarsa 1950-an atau malah jauh lebih awal.

Di tiap perdukahan atau rukun tetangga yang berpenghuni sekitar 30 hingga 60 rumahtangga lumbung paceklik mengumpulkan sejumlah tertentu gabah secara kolektif untuk dijadikan simpanan bersama. Gabah terkumpul hanya boleh dipinjam oleh anggota kelompok ketetanggaan setempat yang luas cakupannya berbeda-beda

di tiap wilayah. Berdasarkan kebiasaan, tiap-tiap rumahtangga wajib menyerahkan satu *bojok* atau sekitar 8 kg gabah kering kepada kelompok. Waktu pengumpulan ditentukan di dalam pertemuan rutin *selapanan* (tiap 35 hari berdasarkan kalender Jawa). Gabah-gabah yang terkumpul disimpan di kediaman ketua kelompok yang umumnya adalah elit atau tokoh masyarakat setempat. Lalu, pada pertemuan berikutnya menjelang puncak paceklik, yaitu sekitar bulan kedua atau ketiga pasca berakhirnya MT3 (Agustus) ditentukan kapan waktunya gabah-gabah terkumpul itu bisa dipinjam oleh warga.

Di kedua desa, jumlah peminjam beragam dari hanya 10 hingga 50 persen dari keseluruhan rumahtangga yang termasuk anggota kelompok lumbung. Keragaman proporsi peminjam tampaknya dipengaruhi tingkat kesejahteraan rumahtangga di lingkungan pertetanggaan setempat. Keragaman ini dipengaruhi seberapa banyak rumahtangga yang tergolong miskin sehingga biasanya sudah kehabisan cadangan gabah sebelum MT1 dimulai dan seberapa banyak rumahtangga yang tingkat kecukupan cadangan gabah dan uang tunainya tinggi sehingga tidak perlu meminjam ke lumbung paceklik.

Tingkat kecukupan cadangan gabah rumahtangga individual ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang terpenting antara lain ialah luas dan produktivitas lahan serta jumlah dan komposisi rumahtangga. Dua persoalan ini akan diulas pada bagian lain. Di sini cukup dikatakan bahwa semakin luas dan produktif lahan yang digarap, semakin banyak kemungkinan rumahtangga tersebut menyimpan cukup banyak gabah.

Ketentuan peminjaman juga beragam di tiap-tiap kelompok lumbung. Ada kelompok yang hanya meminjamkan sebanyak-banyaknya 2 *bojok* atau sekitar 16 kg gabah, ada pula yang bisa meminjamkan lebih dari 1 *bagor* atau sekitar 35 kg gabah lebih. Di satu

kelompok, ketentuannya, setiap 1 *bojok* yang dipinjam, peminjam harus mengembalikan 1 *bojok* ditambah 1 *berok* atau sekitar 0,7 kg gabah kering atau sekitar 9% dari pinjaman pada masa pengumpulan tahun berikutnya. Pada kelompok lainnya setiap 10 kg yang dipinjam, peminjam wajib mengembalikan 10 ditambah 1 kg atau 10% dari pinjaman.

Karena tidak semua anggota meminjam dan setiap peminjam harus mengembalikan pinjaman ditambah kelebihannya, maka puncak bulan paceklik itu tiap kelompok biasanya memiliki sisa gabah. Sisa yang tidak terpinjam ini dijual. Hasil penjualan biasanya dipergunakan untuk membeli barang dan seperti gelas, piring, kursi, terpal, meja, dan sebagainya. Barang dan perkakas ini adalah milik bersama kelompok ketetanggaan perdukunan atau rukun tetangga dan akan dipinjamkan secara cuma-cuma kepada anggota kelompok yang menyelenggarakan ritus peralihan yang penting dalam tradisi budaya Jawa, terutama perkawinan dan kematian.

Bagi rumahtangga yang dianggap cukup mampu sehingga tidak perlu meminjam gabah, keuntungan yang diperoleh dari keikutsertaan dalam tradisi lumbung paceklik bukanlah keuntungan ekonomis, tetapi sosial. Ada semacam tuntutan sosial dari lingkungan pertetanggaan setempat bahwa mereka yang mampu secara ekonomi mestinya ikut membantu tetangga mereka yang kesulitan. Yang tidak bisa memenuhi harapan sosial ini akan mendapatkan sanksi sosial berupa pergunjungan antartetangga yang bisa memuncak pada pengucilan dalam kehidupan bersama.

Mekanisme yang dijalankan dalam lembaga lumbung paceklik memang dirancang sedemikian rupa demi kepentingan subsistensi dan bukannya demi mendapat untung dari menunda jual gabah secara kolektif. Kapasitas tunda-jual dalam lembaga lumbung paceklik ini lebih didorong oleh *sense of crisis* ketimbang oleh perhitungan keuntungan ekonomi dalam mendapatkan harga yang

lebih baik. Karena menurut ingatan tetua-tetua desa praktik lumbung paceklik sudah mulai dipraktikkan semenjak mereka kanak-kanak, kemungkinan besar lumbung paceklik di tingkat pertetanggaan ini sudah dimulai sejak akhir kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Berdasarkan ingatan tetua juga bisa diperkirakan praktik ini melembaga dengan baik saat penduduk desa mengalami krisis subsistensi kolektif yang cukup panjang sepanjang dasawarsa 1940-1960-an.

Paceklik dan *Sense of Crisis*

Krisis subsistensi rumah tangga merupakan kelangkaan cadangan pangan dan terhisapnya aset rumahtangga karena berbagai guncangan. Dalam kehidupan rumahtangga di dua desa, guncangan tersebut meliputi sakit, kecelakaan hingga cacat, atau meninggalnya anggota keluarga, gagal panen, dan bencana yang tak bisa dihindari. Ambruknya ekonomi rumahtangga bisa ditandai dengan pelepasan aset-aset terpokok rumahtangga atau 'turun kelas'. Bila sebelumnya seseorang atau suatu rumahtangga mengandalkan penghidupannya dari upah sebagai buruh tani, setelah salah seorang anggota rumahtangga aktifnya mengalami kecelakaan dan menderita cacat tubuh sehingga tak mampu lagi menjual tenaga kerja sebagai buruh tani, maka rumahtangga tersebut boleh dikatakan mengalami guncangan. Sakit atau cacatnya anggota rumahtangga bisa menguras cadangan gabah dan aset keluarga, terutama lahan. Selain itu, sakit dan cacat menutup beberapa saluran penghidupan yang sebelumnya bisa dimasuki. Akibatnya ialah penurunan total pendapatan rumahtangga. Penurunan pendapatan yang berlangsung terus-menerus ini bisa membuat rumahtangga tersebut runtuh secara ekonomi.

Pada derajat yang lebih 'ringan' krisis subsistensi bisa dialami rumahtangga petani berlahan sempit setiap tahun dalam rupa paceklik. Di dalam pemahaman setempat, istilah paceklik

mengandung dua arti. *Pertama*, paceklik dipahami sebagai masa jeda tanpa kerja-kerja pertanian di sawah secara umum yang ada di rentang antara akhir MT3 hingga masuknya MT1. Arti ini terkait dengan arti *kedua* paceklik sebagai masa kekurangan pada umumnya.

Bagi kebanyakan rumahtangga yang mengandalkan kerja-kerja pertanian sebagai salah satu sumber pendapatan di dalam lingkungan desa, masa paceklik berarti tertutupnya, secara sementara, salah satu saluran penghidupan penting mereka. Berarti mereka tidak bisa mendapatkan uang tunai atau gabah dari luar lumbung rumahtangga mereka sendiri. Untuk melanjutkan kehidupan rumahtangga, mereka bisa saja mengais pekerjaan upahan di luar pertanian, atau, yang biasanya dilakukan, menjual cadangan terakhir gabah simpanan. Pilihan terakhir umumnya tidak bisa memenuhi kebutuhan masa paceklik yang cukup panjang (September-November). Penjualan cadangan gabah seringkali berujung ke paradoks petani kecil: membeli beras dari warung setempat untuk sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena warung setempat juga menjual beras dan tidak banyak rumahtangga yang bukan-petani, maka bisa dikatakan bahwa membeli beras di kalangan petani kecil merupakan hal yang lumrah.

Paceklik rutin memang hanya menghantui tingkat subsistensi rumahtangga petani miskin. Rumahtangga petani kaya, atau petani yang mempunyai juga sumber pendapatan yang jauh lebih besar di luar pertanian tentu tidak mengalami krisis subsistensi meskipun paceklik datang. Hal ini bisa terlihat dari tidak semuanya rumahtangga anggota lumbung paceklik meminjam gabah.

Lain halnya ketika paceklik bencana datang. Paceklik yang tidak rutin ini datang karena adanya kekeringan panjang. Pengalaman terdekat dengan kejadian paceklik bencana ialah musim kemarau panjang 1996-1998 yang menyusutkan kemampuan rata-rata sawah memproduksi gabah. Konon sebagian besar sawah hanya

bisa digarap sekali setahun untuk padi dan sekali untuk palawija yang lebih tahan kemarau seperti singkong. Paceklik bencana seperti ini kemudian memacetkan kinerja lumbung paceklik karena sebagian besar anggotanya memilih untuk menyimpan sendiri gabah panen agar tetap cukup untukantisipasi kemungkinan sulitnya penanaman padi tahun berikutnya.

Pengalaman panjang akan krisis subsistensi di tingkat rumahtangga yang dialami banyak keluarga saat paceklik, baik paceklik rutin maupun bencana, tampaknya menjadi pendorong terkuat bagi terbentuknya lembaga-lembaga solidaritas sosial seperti lumbung paceklik pertetanggaaan dan sumbangan-sumbangan beras. Setidaknya hal ini bisa tampak dari opini-opini yang muncul saat ditanyakan alasan muncul dan tetap berlangsungnya lembaga lumbung paceklik. Tetua-tetua kampung dari kedua desa yang sering dirujuk saat membicarakan sejarah lumbung, hampir selalu menekankan keadaan kekurangan pemenuh kebutuhan pangan di antara keluarga-keluarga petani miskin di sekitar tempat tinggal mereka pada masa-masa tertentu sebagai alasan mulia mendirikan dan menjalankan lumbung paceklik kolektif.

Meski Revolusi Hijau telah melipatgandakan produktivitas argonomis sawah, tapi tampaknya tujuan mulianya untuk meningkatkan kemakmuran penduduk desa belum tercapai sepenuhnya. Dari praktik lumbung paceklik saja kesimpulan tersebut bisa terlihat. Sekitar 20 hingga 50 persen rumahtangga di kelompok pertetanggaaan meminjam gabah untuk memenuhi kebutuhan sepanjang masa paceklik.

Perempuan dan Pengembangan Lumbung Paceklik

Praktik lumbung paceklik bisa dikembangkan lebih lanjut menjadi lembaga tunda-jual kolektif yang lebih bisa mengembangkan kapasitas kolektif melalui krisis-krisis subsistensi di tingkat kolektif.

Meski landasan praktik lumbung paceklik tersebut menangani krisis subsistensi di tingkat rumahtangga dan dengan demikian berakar pada orientasi kebutuhan subsistensi.

Di tingkat komuniti pertetanggaan, lumbung-lumbung paceklik yang sudah sekian lama dipraktikkan juga memenuhi kebutuhan akan peralatan yang diperlukan saat upacara-upacara penting ritus peralihan seperti perkawinan dan kematian. Sisa gabah yang tidak terpinjam kembali diuangkan untuk kemudian dipakai untuk membeli meja-meja, kursi, gelas, piring, tenda terpal, dan seragam sinoman (petugas/panitian upacara perkawinan yang biasanya adalah anggota karang taruna setempat). Dari amatan atas 'barang-barang kolektif' yang dipunyai beberapa kelompok lumbung pertetanggaan, tampaknya lumbung tidak sekadar tanggapan terhadap krisis subsistensi rumahtangga, tetapi juga berpotensi untuk dikembangkan menjadi sarana usaha kolektif.

'Barang-barang kolektif' hasil pembelian dari kelebihan gabah lumbung pertetanggaan memungkinkan warga pertetanggaan mengadakan upacara ritus peralihan penting tanpa banyak mengeluarkan uang sewa untuk barang-barang tersebut. Artinya alokasi keluarnya uang tunai berkurang. Bagi rumahtangga yang tergolong miskin, berarti semakin tidak banyak gabah yang mesti dijual segera. Sebetulnya ada pemikiran di antara warga untuk menjadikan barang-barang upacara ini sebagai sumber pendapatan kolektif. Misalnya dengan menyewakannya kepada penduduk desa lain yang lebih dekat ke kota kecamatan dengan kebiasaan lumbung dan kepemilikan barang upacara kolektif yang mulai luntur.

Teramati dari kemampuan kelompok pertetanggaan memobilisasi gabah dan warganya untuk mengorganisasi semacam penjaminan sosial bagi semua anggota, bisa dikatakan bahwa pada dasarnya organisasi lumbung paceklik bisa dikembangkan lebih lanjut. Misalnya untuk mendukung berbagai kegiatan kelompok tani

yang sedang gencar dibangun di wilayah Boyolali. Sebagai contoh kelompok tani yang terbentuk beberapa tahun lalu sedang mengembangkan usaha pembuatan pupuk organik.

LSM pendamping berhasil mendapatkan dana untuk membeli mesin penghancur jerami, bahan pokok untuk kompos. Kapasitas mesin untuk memproduksi pupuk sebetulnya cukup besar. Kendalanya ialah jarang sekali mesin tersebut dijalankan. Alasan ketua kelompok ialah keberadaan tempat. Mereka sedang mengupayakan mendapatkan bantuan berupa hibah lahan kosong yang ke depan akan dijadikan semacam 'bengkel produksi' pupuk. Tentu saja tempat operasi penting. Tetapi, di tengah-tengah desakan untuk dapat memenuhi kebutuhan rumahtangga yang banyak memerlukan uang, anggota laki-laki rumahtangga petani kecil umumnya merupakan bagian dari golongan semiproletar yang mesti bekerja upahan di kota-kota dengan hanya waktu-waktu tertentu saja mereka pulang ke kampung.

Tentu perekonomian desa tidak akan sanggup menampung pekerja-pekerja pedesaan ini seluruhnya. Tetapi setidaknya apabila bengkel produksi pupuk dijalankan secara ekonomis, misalnya dengan membeli bahan dari rumahtangga anggota, menjual hasil produksi berlebih ke desa tetangga, dan mengupah para pekerja bengkel, maka setidaknya kegiatan kelompok tani bisa menjadi sumber pendapatan tambahan buat rumahtangga petani miskin tanpa harus menjadi buruh upahan ke kota.

Migrasi keluar golongan usia muda, terutama laki-laki, terjadi di kedua desa. Namun, hanya di salah satu desa saja yang semua anggota kelompok lumbung pakekliknya perempuan. Ada kelebihan lumbung pakeklik beranggota perempuan ini. Pertama, di dalam pembagian kerja tradisional rumahtangga miskin, perempuan menduduki tempat penting karena menjaga rumah dan anggota lain yang belum bisa menyumbang tenaga untuk pemasukan

rumahtangga. Perempuan adalah manajer dapur yang tahu pasti kebutuhan musiman akan bahan pangan.

Kedua, perempuan rumahtangga miskin aktif dalam kerja-kerja pertanian yang umumnya kolektif seperti tanam dan panen. Dengan kedudukan seperti ini perjumpaan tatap muka di antara perempuan yang tinggal di kelompok pertetangga yang sama memudahkan mengalirnya informasi di antara mereka. Keadaan ini penting tidak hanya untuk membentuk organisasi yang tidak mengasingkan anggota dari sesamanya, tetapi juga untuk mengembangkan mekanisme pengawasan lewat lembaga tradisional perempuan desa: gosip dan pengasingan mereka yang dianggap menyalahi kebiasaan setempat. Kekurangannya, tekanan dari pejabat atau elit desa laki-laki mudah membuat kelompok tidak bergerak karena di dalam struktur politik setempat, kedudukan perempuan masih terbatas. Di kedua desa, tidak ada aparat pemerintahan desa atau pimpinan partai politik perempuan.

6. Penutup

Di bawah pengaruh perekonomian pasar kapitalis, petani padi menghadapi dua watak ganda gabah: sebagai bahan pangan pokok sekaligus sumber uang tunai (Cederroth, 1995). Watak ganda ini berpengaruh besar terhadap kapasitas tunda jual dan keragaman ciri atau karakter tunda jual bagi rumahtangga berbeda.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kapasitas tunda jual petani. Faktor-faktor tersebut bisa dipilah ke dalam tiga kategori, yaitu 1) faktor-faktor sosioagronomis, 2) sosiokultural, dan 3) ekonomi politik. Faktor sosioagronomis mencakup produktivitas lahan secara teknis, ongkos produksi rata-rata, dan teknologi. Faktor sosiokultural berkenaan dengan adat kebiasaan yang terkait langsung dengan padi, termasuk konsumsi kultural beras. Faktor ekonomi politik mencakup persoalan yang terkait dengan hubungan kelembagaan dalam produksi dan distribusi lahan.

Secara ekonomi politik, terkait dengan karakteristik rumahtangga, praktik tunda jual terbagi dua: 1) tunda jual subsistensi dan 2) tunda jual komersial. Yang pertama merupakan praktik yang lebih umum dan menjadi gambaran praktik tunda jual rata-rata rumahtangga petani. Sementara yang kedua secara sadar dipraktikkan oleh sebagian kecil rumahtangga yang tergolong petani kaya.

Dalam konteks Jawa kontemporer, penggolongan rumahtangga kaya-miskin seringkali tidak hanya terkait dengan luasan lahan yang dikelola dan produktivitas agronomisnya, tetapi lebih kepada keragaman sumber pendapatan di luar kerja-kerja pertanian (Collier, dkk., 1996; Mulyanto dkk., 2009). Di kedua desa,

golongan petani kaya yang biasanya sekaligus juga pegawai negeri dengan gaji tetap bulanan, merupakan golongan yang paling sanggup menunda jual panen karena untuk kebutuhan uang tunai mereka bisa penuh dari gaji bulanan. Orientasi tunda jual di antara mereka pun sepenuhnya komersial, yaitu mendapatkan harga jual tertinggi yang bisa didapat di pasar.

Sementara itu, petani-petani lain yang tidak mempunyai sumber pendapatan uang tunai tetap di luar penjualan gabah termasuk golongan yang paling rendah kapasitas tunda jualnya. Bagi rata-rata rumahtangga petani kecil yang sebagian sumber pendapatannya didapat dari kerja-kerja upahan, kapasitas tunda jual dilakukan demi jaminan bahan pangan pokok sepanjang tahun. Sekali ada krisis ekonomi di tingkat rumahtangga yang mendesak pengeluaran cukup banyak uang tunai, maka akan dengan cepat cadangan gabah rumahtangga dijual dan membuat beberapa bulan sebelum panen berikutnya, mereka bergantung kepada pasar untuk perolehan berasnya. Dengan demikian penguatan kapasitas tunda jual, baik di tingkat rumahtangga maupun di tingkat komunitas melalui lembaga lumbung simpan bersama, cukup berarti dalam menambah kekuatan daya tawar dan perolehan harga yang adil bagi petani.

Dari telaah atas berbagai kasus di kedua desa, hubungan kelembagaan yang berorientasi pasar dan paling banyak pengaruhnya terhadap kapasitas tunda-jual gabah ialah sewa-tunai lahan. Sewa-tunai mendorong petani untuk menjual panen sesegera mungkin. Keberhasilan menjual panen segera memungkinkan mereka membayar sewa lahan yang sudah umum dilakukan semusim sebelum hak sewa diperoleh.

Selain berkembangnya sistem sewa-tunai, tentu ada banyak faktor yang mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak, terhadap kapasitas tunda-jual gabah. Meski demikian, petani-petani

penggarap yang mengelola sendiri lahan milik sendiri, meskipun tidak ditekan oleh sistem sewa kapitalistik, tetapi hidup di dalam dunia yang dipengaruhi oleh sistem sewa dan orientasi pasarnya. Misalnya, besarnya luasan lahan di suatu desa yang dikelola melalui sistem sewa-tunai akan berpengaruh terhadap meluasnya praktik tebasan yang pada suatu titik waktu tertentu bisa menjadi satu-satunya praktik jual-beli gabah. Pada tingkat komunitas, perkembangan ke arah tidak adanya alternatif selain tebasan menjadikan kedaulatan pangan komunitas menjadi terbatas dan sulit dibangun.

Susutnya jalur alternatif selain tebasan juga berdampak pada fluktuasi harga jual gabah. Karena produksi padi masih mengandalkan musim dan teknologi sederhana, maka tidak sepanjang tahun petani bisa memproduksi gabah. Artinya, meluasnya tebasan menjadikan harga jual petani saat panen raya turun karena gabah melimpah langsung dari sawah ke pasar. Pasar menjadi kelebihan pasokan gabah karena hampir semua petani menjual langsung gabahnya. Pada saat luasan wilayah produksi padi menyusut, biasanya pada musim tanam ketiga saat sebagian besar lahan kekurangan air atau petani beralih ke tanaman lain, harga gabah melonjak. Dalam keadaan seperti ini hanya petani-petani berlahan luas dan pengusaha beras yang memiliki kapasitas tunda-jual jauh lebih baik karena didukung kedudukan struktural mereka di dalam jaringan perdagangan yang akan teruntungkan secara ekonomis.

Dalam kaitannya dengan kedaulatan pangan komunitas, semestinya intervensi penguatan kapasitas tunda jual didorong ke arah penguatan tunda jual subsistensi atau tunda-jual bagi yang perlu. Di tengah struktur sosial pedesaan yang timpang dan menguntungkan kalangan elite desa, penguatan kapasitas tunda jual yang abai terhadap kenyataan ini akan memperkuat ketimpangan yang sudah ada dan mempersulit golongan lemah untuk keluar dari

dampak negatif kekuatan pasar. Akibat lebih lanjutnya ialah melemahnya ikatan antarpenduduk desa sehingga bisa saja melenyapkan ikatan komuniti dan mempersulit lagi penerapan berbagai program intervensi kepada penduduk desa.

Bahan Bacaan

- Boomgaard, Peter (2002) *From Subsistence Crises to Business Cycle Depressions, Indonesia 1800-1940*. Project Paper No.1 Coping with Crisis in Indonesia: Comparative, Local, dan Historical Dimension. Leiden: KITLV.
- Breman, Jan dan Gunawan Wiradi (2004) *Masa Cerah dan Masa Suram di Pedesaan Jawa: Studi Kasus Dinamika Sosio-ekonomi di Dua Desa Menjelang Akhir Abad ke-20*. Jakarta: LP3ES dan KITLV-Jakarta.
- Cederroth, Sven (1995) *Survival and Provit in Rural Java: The Case of an East Javanese Village*. Richmond, Surrey: Curzon Press.
- Collier, William dkk. (1996) *Pendekatan Baru dalam Pembangunan Pedesaan di Jawa: Kajian Pedesaan Selama Dua Puluh Lima Tahun*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hüsken, Frans (1998) *Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman: Sejarah Diferensiasi Sosial di Jawa 1830-1980*. Jakarta Grasindo.
- Kasryno, Faisal (2006) Anatomi Masalah Perberasan nasional Indonesia, Makalah dalam Paddy Chains Workshop "Memahami Rantai Padi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani Kecil, Cisarua, 23-25 Agustus.
- Mulyanto, Dede, dkk. (2009) *Kapitalisasi dalam Penghidupan di Pedesaan*, Bandung: Akatiga.
- Soemarwoto, Otto dan G.R. Conway (1992) The Javanese Homegarden, dalam *Journal for Farming System Research-Extension* 2 (3): 95-118



Lembaga nir laba yang lahir dari keprihatinan terhadap persoalan kelaparan dan nasib petani penghasil pangan. KRKP didirikan sebagai media bagi pencapaian hak atas pangan dengan pendekatan kedaulatan pangan ditingkat lokal, nasional dan internasional melalui advokasi, kajian, pengembangan kapasitas dan penguatan jaringan baik, nasional maupun internasional.